

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN  
PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN BEBESEN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

OLEH :

REZA EKA SAPUTRA  
17.852.0015



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN  
PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI  
DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN BEBESEN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

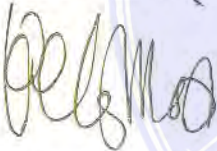
Nama Mahasiswa : Reza Eka Saputra

NPM : 178520015

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.AP**

Pembimbing II



**Agung Suharyanto, S.Sn M.Si**

Mengetahui :

Dekan



**Dr. Heri Kusmanto, MA**

Ka. Prodi Administrasi Publik

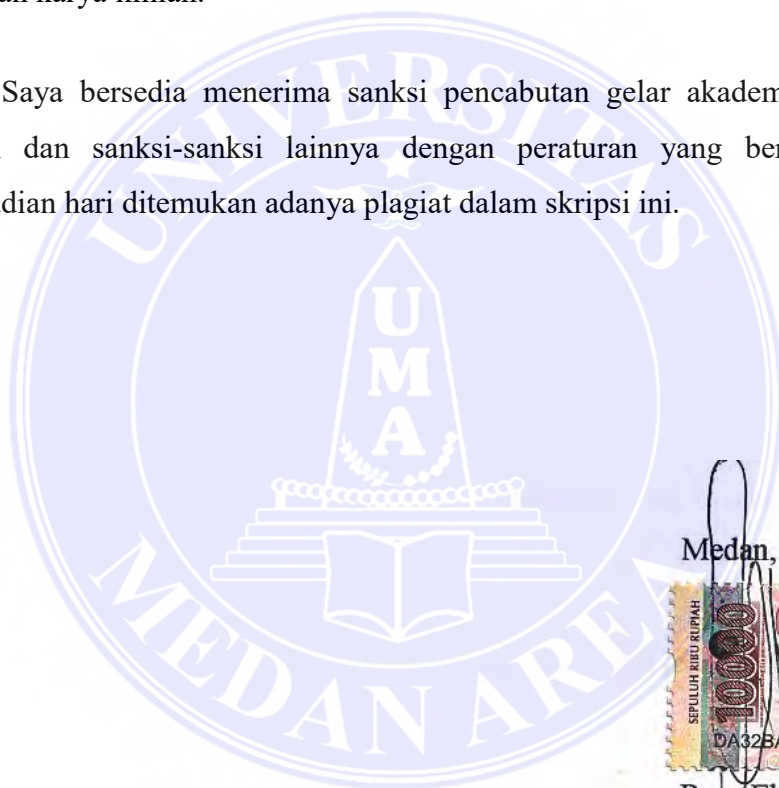


**Nina Angelina, S.Sos, M.Si**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Maret 2021



Reza Eka Saputra

178520015



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REZA EKA SAPUTRA

NPM : 17.852.001

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Isipol

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : juni 2021  
Yang Menyatakan

(REZA EKA SAPUTRA)

## ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunan (BPNT) adalah bantuan yang di salurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp.110.000 / KPM melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan dalam bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank himpunan bank Negara yang kemudian disebut e – warung program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan pengganti dari Rastra/Raskin. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah disalurkan di beberapa Desa di Kecamatan Besesen, namun dalam penyalurannya masih terdapat masalah yaitu ketidaktepat sasaran dalam penyaluran bantuan pangan tersebut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dan apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa pandemi covid-19 Di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui pemerintah desa memiliki peranan dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diantaranya adalah melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi dan kendala dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai adalah: Sistem Data/data tidak ditemukan, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, kurang lengkapnya administrasi penduduk, terlambatnya dana bantuan datang kementerian ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

**Kata Kunci:** Peranan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pemerintah Desa

## ABSTRACT

*The Non-Tuna Food Assistance Program (BPNT) is assistance that is distributed non-cash from the government to Beneficiary Families (KPM) every month for IDR 110,000 / KPM through an electronic account mechanism in the form of a Prosperous Family Card (KKS) which is used only to buy necessities in foodstuffs in places that have collaborated with Banks associated with State banks, which are then called e - stalls for the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program, are a substitute for Rastra / Raskin. The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has been distributed in several villages in Besesen District, however in its distribution there is still a problem, namely the inaccuracy in the distribution of the food aid. Therefore, the researcher wants to know how the role of the village government and what are the obstacles in the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) program during the covid-19 pandemic in Simpang Empat Village, Bebesen District, Central Aceh Regency). The method used by researchers in this research is qualitative research methods through interviews, observation, and documentation. From the results of the research, it is known that the village government has a role in distributing Non-Cash Food Assistance (BPNT) including socialization, monitoring and evaluation and the obstacles in distributing Non-Cash Food Assistance are: Data / data systems not found, not on target, not according to time that has been determined, the incomplete administration of the population, the ministry's late arrival of aid funds to the Beneficiary Family (KPM) account.*

**Keywords:** Role, Non-Cash Food Assistance (BPNT), Village Government

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil di selesaikan. Dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, semangat motivasi, arahan, dan do'a dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua saya atas motivasi, nasehat, do'a yang tiada henti serta dukungan baik materi maupu moril
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Meda Area
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Meda Area
4. Ibu Beby Masitho Batubara,S.Sos, M.AP selaku WD 1 dan dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini



5. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M,Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
6. Ibu Nina Angelina, S.sos,M.Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
7. Ibu Aisyah Oktaviani Putri, S.AP.MAP selaku sekretaris penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Pemerintah Desa khususnya Desa Simpang Empat yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penelitian ini juga staf yang membantu penulis dalam urusan data.
9. Teman-teman Administrasi Publik stambuk 2017 yang selalu mensupport dan telang berjuang bersama hingga sampai titik sekarang ini.
10. Bapak / Ibu dan Staff lingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Meda Area (UMA)

Medan,14 Mei 2021  
Penulis

Reza Eka Saputra  
178520015

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABTRACK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Peranan.....	6
2.2 Pemerintah Desa .....	9
2.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	11
2.3.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai .....	11
2.3.2 Tujuan Dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.....	11
2.3.3 Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.....	13
2.4 Bantuan Pemerintah Non Tunai.....	14
2.4.1 Rincian Bantuan Pangan Non Tunai.....	14
2.4.2 Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai.....	15
2.4.3 Kelemahan Bantuan Pangan Non Tunai .....	17

2.5.1 Pengertian Desa.....	21
2.5.2 Peran Aparatur Desa .....	21
2.6 Penelitian Terdahulu .....	22
2.7 Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.2.2 Waktu Penelitian .....	29
3.3 Informan Penelitian .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4.1 Observasi.....	31
3.4.2 Wawancara .....	32
3.4.3 Dokumentasi.....	32
3.4.4 Triangulasi Data .....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	36
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.2 Struktur Organisasi.....	38
4.1.3 Kondisi Geografis Desa Simpang Empat.....	44
4.1.4 Tujuan dan Sasaran Desa Simpang Empat.....	44
4.1.5 Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2020 .....	45

4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Peranan Pemerintah Desa dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa pandemi covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.....	47
4.2.2 Kendala-kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa pandemi covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	39



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Waktu.....	29
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintah Kampung .....	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Perdesun .....	37
Tabel 4.3 Letak Geografis Desa Simpang Empat .....	44
Tabel 4.5 Data Penerima BPNT.....	46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta Keluarga Penerima

Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Sementara sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut. Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang 4 seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg.

Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan. Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik.

Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera(KKS), peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Salah satu penanggulangan kemiskinan yang sudah terleasi yaitu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Namun, dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut masih terdapat beberapa



permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dimana berdasarkan informasi yang penellti dapat di lapangan masih ada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kondisi ekonominya tergolong mapan sementara warga yang lebih layak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak menerimanya.

Peran Pemerintah Desa sangat penting dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan dalam bidang pangan dalam suatu daerah. Dalam hal ini peranan Pemerintah Desa sangat diharapkan untuk melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan masih belum efektif dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini karena masih adanya masalah yang di jumpai dalam penyaluran BPNT ini

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah di salurkan di beberapa Desa di Kecamatan Besesen, namum dalam penyalurannya masih terdapat masalah yaitu ketidaktepatsasaran dalam penyaluran bantuan pangan tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Masa Pandemi Covid 19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Penyaluran Program BantuanPangan Non Tunai (BPNT) pada Masa Pandemi Covid 19di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran program BantuanPangan Non Tunai (BPNT) pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam menulis karya ilmiah tentang Implementasi Kebijakan/Peraturan Pemerintah daerah
2. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam menulis karya ilmiah tentang Implementasi Kebijakan/Peraturan Pemerintah daerah



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Peranan

Peranan berarti suatu fungsi (*role*), ialah suatu tindakan, sikap, maupun cara yang dilakukan untuk kegunaan diri, baik dalam arti kegunaan diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu bagi orang lain. Kegunaan diri seseorang bagi orang lain disebut dengan istilah “kewajiban” yang harus ditunaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki status maupun kedudukan tertentu.

Dalam teorinya Biddle dan Thomas, yang dikutip oleh Sarwono (2004:21) mengatakan bahwa: Peran serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas seperti dikutip Sarwono membagi peristilahan teori dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang yang berperilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Jadi peran adalah seperangkat tindakan atau perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sedang terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Bakir (2009:348) “Peran diartikan sebagai tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan



dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran, oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat di katakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah bebab atau tugas

Menurut Merton dalam Raho (2007:68) “hakikatnya peranan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh sesuatu jabatan tertentu. Keperibadian juga mempengaruhi bagaimana peranan itu harus dilaksanakan”. Peran yang dilakukan pada hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peran yang sama peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan posisi hidupnya. Hal ini berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya sebagai pemangku peranan. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang disekelilingnya.

Menurut Soekanto (2002:223) bahwa “peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi untuk melaksanakan hak hak dan kewajiban sesuai kedudukannya”.

Soekanto (2002:225) mengatakan bahwa peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas – tugasnya, sebagai aspek yuridis peranan tersebut.

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Mintzebrg dalam Thoha (2012:12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antar pribadi (*interpersonal role*), dalam peranan antar pribadi atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*information role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam mendapatkan informasi
3. Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnnya. Dalam hal ini peranan diartikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu dimana peranan ini dilandaskan pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, maksudnya pemegang peranan diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kedudukan yang diduduki.

## 2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu :

1. Penyelenggara pemerintahan pelaksanaan pembangunan,
2. Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol

dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman, dan damai.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah

## 2.3 Program Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

### 2.3.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya harus diatur dengan baik. angan atau disebut E-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur



### 2.3.2 Tujuan Dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

1. Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut:
  - a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
  - b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - d. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
  - f. Mendorong usaha eceran rakyat.
2. Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat(KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - b. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
  - c. Meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
  - d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

### 2.3.3 Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 tahap, pertama adalah Transfer Dana Bantuan Pangan dan berikutnya Notifikasi kepada KPM.

1. Transfer Dana Bantuan Pangan.
  - a. Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat(KPM) berdasarkan DPM-1 perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
  - b. Pemindah bukuan dana bantuan pangan dari rekening Kementerian Sosial pada Bank Penyalur ke Akun Elektronik Bantuan Pangan Keluarga Penerima Manfaat(KPM) dilakukan 30 (tiga puluh) dari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementrian Sosial di Bank Penyalur.
  - c. Transfer dana bantuan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan Keluarga Penerima Manfaat(KPM) tidak dikenakan biaya administrasi.
  - d. Aktiva dilakukan melalui sistem Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan Keluarga Penerima Manfaat(KPM)
2. Notifikasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - a. Bank penyalur memberikan notifikasi dana bantuan pangan yang sudah di transfer ke Akun Elektronik Bantuan Pangan Keluarga Penerima

Manfaat(KPM) antara lain dapat berupa SMS ke nomor HP KTM atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menginformasikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hal-hal terkait Bantuan Pangan Non Tunai.

- b. Notifikasi sebagaimana dimaksud pada poin di atas sekurang-kurangnya meliputi informasi bahwa transfer dan Bantuan Pangan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah dilakukan serta jumlah dana Bantuan Pangan tersebut.
- c. Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab Bank Penyalur dan tidak memotong besaran Bantuan Pangan.
- d. Pembelian Bahan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada e-warong.

## **2.4 Bantuan Pemerintah Non Tunai**

### **2.4.1 Rincian Bantuan Pangan Non Tunai**

Pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19. Dana triliunan rupiah itu dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.

Bantuan pemerintah daerah selamancovid 19, berikut daftar bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemi:

#### **1. Bantuan sembako**

Bantuan sosial berupa paket sembakodikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret.

## 2. Listrik gratis

Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Awalnya, listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun kemudian diperpanjang hingga akhir tahun.

3. Kartu Prakerja  
Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya, untuk insentif. Adapun insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000). Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).

## 2.4.2 Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Selektif;
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan; Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
  - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. Sesuai tujuan penggunaan.

Arti sosial dalam pembahasan ini ada 2 macam, yaitu: sosial secara umum dan sosial organisasi. Sosial secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai banyak kemurniannya. Sebagai contoh: Suatu organisasi



sosial atau nonorganisasi (sosial pribadi) bekerja lebih menekankan pada kegiatan sosial tanpa pamrih yang benar-benar tulus keluar dari hati nurani yang paling dalam. Kegiatan tersebut dapat berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Mereka memberikan bantuan tersebut tidak ada tendensi apapun untuk menjadikan agar nama mereka terkenal.

Sosial organisasi disini diartikan melakukan suatu kegiatan sosial dengan menampung bantuan yang diorganisir oleh pihak tertentu dan terkadang dipolitisir untuk mencari sensasi misalnya menjadikan orang tersebut terkenal atau dijadikan idola dan cenderung bermuatan politik. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini mekanisme tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi sehingga upaya pemberian bantuan tidak terjadi overlooping atau ada data-data yang tidak terdeteksi. Dalam penyampaian bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan data yang akurat sehingga dapat dijadikan untuk membuat database. Dengan database tersebut kita dapat membuat semacam kartu pintar (*smart card*) yang memiliki fasilitas untuk memperoleh bantuan secara benar dan tidak dapat disalahgunakan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya.

### **2.4.3. Kelebihan Dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai**

Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan transformasi bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perubahan ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Program BPNT dinilai memiliki sejumlah kelebihan seperti:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM),
2. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras atau telur)
3. Tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).
3. Sebagai strategi pemerintah mengurangi deviasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai tindak lanjut saran KPK terkait ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan sosial

Transformasi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 di 44 Kota. Pada 2018, dilaksanakan perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 44 kota menjadi 219 kabupaten/kota secara bertahap dengan target 10 juta KPM. Tercatat saat ini, 5,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 202 Kabupaten masih menerima bantuan dalam skema penyaluran Bantuan Sosial Rastra. Guna menyeragamkan transformasi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kemensos menargetkan per 1 September 2019, tidak ada lagi Rastra. Aturan ini berlaku nasional. "Pada 2019, ditargetkan 514 kabupaten/kota di Indonesia sudah bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan sasaran 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulung, dalam acara Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Penyaluran Bantuan Sosial Pangan 6T untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, di Novotel Manado Golf Resort & Convention

Center, Manado, Sulawesi Utara, Kamis, (15/8/2019). Dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai BPNT, Kemensos mulai tahun 2019 menggandeng Perum Bulog melalui kerja sama dengan e-Warong (e-Warong KUBE, agen bank, dan RPK mitra Bulog) sebagai pemasok bahan pangan beras dan telur, terutama di daerah non penghasil beras. Hal diyakini dapat membantu percepatan pendistribusian stok beras yang dimiliki Bulog. "Melalui strategi manajemen pemasaran yang dimiliki, saya yakin Bulog dapat berperan.

Penyaluran bantuan sosial berupa beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial sejauh ini telah berjalan dengan baik. Namun, mekanisme pelaksanaan bantuan masih perlu perbaikan pada beberapa aspek. Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan Program Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Istiana Hermawati mengatakan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 21 kota lokasi monitoring secara umum telah sesuai dengan pedoman. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesesuaian mekanisme pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan pedoman umum yang berkisar antara 64,81-87,05 persen dan rata-rata 77,54 persen atau masuk dalam kategori tinggi. "Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbukti bermanfaat membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan gizi KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cenderung menjadi 'lahan' yang menguntungkan bukan hanya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga bagi beberapa pihak terkait," kata Istiana dalam pemaparan di Yogyakarta, Jumat (14/9). Ia menjelaskan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga sudah memenuhi indikator kunci, dengan rata-rata 93,77

persen. Adapun rincian indikator tersebut yakni tepat kualitas (98,41 persen), tepat harga (97,92 persen), tepat manfaat (96,63 persen), tepat jumlah (96,03 persen), tepat waktu (92,38 persen), tepat sasaran (89,08 persen), dan tepat administrasi (69,91 persen). Ketepatan administrasi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) layak mendapat perhatian lebih, terutama menyangkut ketertiban dokumen pendukung mengenai DPM, hasil musyawarah, koordinasi berjenjang, dan laporan pengaduan masyarakat. "Penyaluran bantuan secara berjenjang untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beserta upaya pertanggungjawaban agar dapat dicapai hasil yang efektif," ujarnya. Sementara itu, pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih menemui sejumlah kendala di antaranya registrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan, pengendalian, dan pemanfaatan yang belum optimal di beberapa daerah.

Berbagai kendala ini disebabkan oleh ketidaksiapan Tim Bansos. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menjelaskan survei yang dilakukan tersebut penting untuk melihat kinerja kementerian. Setidaknya, dapat memperbaiki penyaluran bantuan yang kurang efektif. "Ini dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada orang miskin. Jangan sakit hati kalau tidak dipercaya orang luar (hasil survei). Tapi itu bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatannya," ucapnya. Sebab itu, Andi akan mengevaluasi sejumlah kekurangan itu hingga membenahi aspek-aspek lain agar kinerja kementerian lebih efektif dan efisien. "Kemiskinan ternyata bukan masalah uang. Tapi masalah mindset, seperti ketidaktahuan dan ketakutan. Sebab, ada warga

yang diberikan bantuan dalam menjalankan usaha, tapi tidak berjalan karena tak ada pendampingan.

## 2.5 Desa

### 2.5.1 Pengertian Desa

Desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang sudah terbentuk dari masyarakat adat yang sudah ada sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintahan lokal tersebut terdiri dari sistem nilai dan lembaga pemerintahan yang tumbuh dan berkembang yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah Indonesia merdeka, desa menjadi salah satu unsur pemerintahan formal dalam sistem desentralisasi. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkan desa sebagai daerah administratif di bawah kecamatan. Setelah itu, pemerintahan desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2014, pengaturan tentang desa kembali dipisahkan dari pengaturan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting untuk dapat mengkaji arah perkembangan politik hukum pemerintahan desa, setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



### 2.5.2 Peran Aparatur Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2.c ada empat perangkat khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa.

Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.

Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi. "Harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa penularan dan sebagainya, pencegahan sebagainya kepada masyarakat,"

Ketiga, perangkat desa menanggapi inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Misalnya, imbauan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemic

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu oleh peneliti lain, dan memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah skripsi Rohana, Maryanto Demography Journal of Sriwijaya. Universitas Sriwijaya Vol. 3 No. 1 Januari 2019 dengan judul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang ditemukan beberapa masalah dan hambatan. Hambatan yang muncul selama pelaksanaan program ini menurut hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Sosial Kota Palembang dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih banyak aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti proses pendampingan yang masih dirasa kurang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu komando error yang mengakibatkan hilangnya saldo Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah e-warong Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak banyak serta belum merata secara keseluruhan, serta tidak memenuhi tahapan kegiatan pendamping yang telah diatur dalam program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang belum berjalan dengan efektif.

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Palembang sedangkan penelitian yang diteliti yaitu di Aceh Tengah.

2. Penelitian kedua yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah artikel dari Hikmah Hayati, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2016, dengan judul "Peran Dinas Sosial Dalam penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung". Penelitian ini menggunakan hukum normatif – empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonstruksi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung ada 3 diantaranya yaitu minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam pembuatan rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu yang cukup lama, bahasa terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi

pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing-masing, dan dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering salah gunakan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan bantuan sosial, pada penelitian ini bantuan sosial bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan sedangkan tujuan bantuan sosial yang dilakukan peneliti untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Perbedaan penelitian juga terdapat pada lokasi penelitian, jika pada penelitian ini dilakukan di Lampung pada penelitian yang telah diteliti dilakukan di Aceh Tengah.

3. Penelitian ketiga yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah skripsi dari Nunung Iftanul Mustafida Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2019, dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalbaru Kabupaten Banyuwangi” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yaitu: Program BPNT ini merupakan program pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin, implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sesuai dengan buku panduan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018. Meskipun dalam proses penyaluran program masih

memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kurangnya *E-warong* atau agen penyalur yang menyebabkan antrian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pengambilan bantuan, kurangnya koordinasi antara pendamping BPNT baik dari TKSK (pendamping BPNT KPM murni) maupun pendamping sosial PKH (pendamping KPM BPNT + PKH) serta memberikan dampak dan manfaat baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian ini lokasi penelitian di Banyuwangi sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Aceh Tengah.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Secara operasional dapat dijelaskan bahwa tujuan setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan dalam hal pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. Pemerintah Desa adalah salah satu organisasi pemerintahan yang melayani publik dengan berbagai tugas pokok dan fungsi.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak dapat kita jamin bahwasanya program tersebut berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya. Dalam hal ini pihak pemerintah desa sebagai pelaksana di daerah sangat dibutuhkan peranannya dalam memantau dan evaluasi program yang telah dijalankan dalam menyalurkan cukup serius bantuan pangan non tunai khususnya

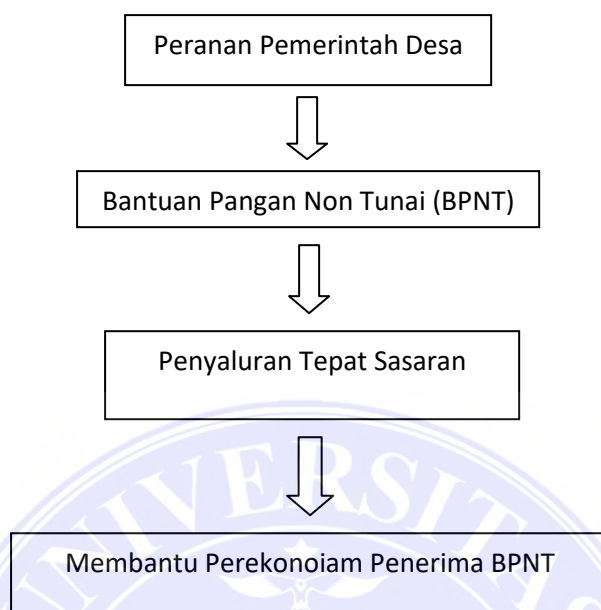


Pemerintah Desa Simpang Empat Kabupaten Aceh Tengah sangat dibutuhkan pemantauan dalam penyaluran oleh pihak pelaksana di Desa mengenai sesuai atau tidaknya penerima BPNT yang telah ditetapkan oleh pihak pelaksana di desa.

Peranan Pemerintah Desa ini sangat diharapkan dalam membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Indonesia dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun salah satu cara mewujudkannya adalah dengan adanya program-program seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut. Diharapkan program tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Peneliti menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomastentang Peran serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu untuk mengetahui peranan dalam suatu kebijakan agar dapat lebih mudah mengetahui Program Bantuan Sosial khususnya Non Tunai untuk masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
Kerangka Berfikir Penelitian

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait dengan masalah yang sifatnya sosial yang terjadi dalam pelayanan masyarakat dan peneliti ingin melakukan eksplorasi secara mendalam. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan berbagai data yang dihimpun, kemudian dihimpun setelah itu dianalisis kemudian bergerak kearah kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang diajukan.

Menurut Sugiyono (2015: 15) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Menurut Sugiyono (2015: 21) Karakteristik penelitian Kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) langsung kesumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Dalam hal ini peneliti mencari informasi penyebab tidak terimplementasinya bantuan social gratis pemerintah dengan baik khususnya pada masyarakat yang terdampak virus corona, apakah hal ini disebabkan oleh Kesalahan dari Kementrian Sosial atau di sebabkan oleh pemerintah itu sendiri.

### **3.2 Lokasi dan Waku Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian hal terpenting dalam melakukan penelitian, lokasi merupakan objek penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian adalah di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penyusunan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian. Adapun tahapan perincian kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang tertera Tabel 3.1 berikut ini:

No	Uraian Kegiatan	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2020	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021
1.	Penyusunan proposal									
2.	Seminar proposal									
3.	Perbaikan proposal									
4.	Pengambilan Data/ Penelitian									
5.	Penyusunan skripsi									
6.	Seminar hasil									
7.	Perbaikan Skripsi									
8.	Sidang meja hijau									

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**



### 3.3 Informan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian informan memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi. Menurut (Hendraso dalam Suyanto 2005: (171 – 172)). Informan penelitian ada tiga macam, yaitu informan Informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*general informan*) dan informan tambahan.

#### 1. Informan kunci (*key informan*)

Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

#### 2. Informan utama atau umum (*general informan*)

Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan penelitian yang akan di pelajari. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Sekretaris Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

#### 3. Informan tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1 Observasi

Observasi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi dilapangan. Seperti halnya yang dikatakan Poerwandri dalam Gunawan(2013:143) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.

Husaini Usman dalam Hartomo (2017:90) bahwa observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (*reliabilitas*) dan kesahihannya(*validitas*)

#### 3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang informan. (Setyadin dalam Gunawan 2013:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady dalam Hartono(2018:90) menyimpulkan bahwa wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Dalam penelitian ini yang menjadi *interviewee* adalah Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Sekretaris Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh

Tengah dan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Menurut Sugiyono(2015:239), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Menurut Burhan Bungin dalam Gunawan, (2013:176), teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

Guba dalam Gunawan (2013: 176) menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan *record*. Definisi dari *record* adalah setiap pernyataan tertulis oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akuntin. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu proses pembuktian yang akurat untuk pengumpulan data dalam penelitian, baik itu yang bersifat tertulis, gambar, karya-karya, maupun buku.

### 3.3.4 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan atau menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Sugiyono (2007:372)

mengemukakan bahwa triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan caramemanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi menurut Denzin dalam Tohirin, (2011:73-74) membedakan empat macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber, caranya antara lain: (1) membandingkan data hasil dengan data hasil wawancara. (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa dikatakan secara pribadi. (3) membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah, dan tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode. Caranya adalah: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penelitian. Caranya adalah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan hasil pekerjaan seseorang analisi seseorang analisi lainnya dalam konteks yang berkenaan.

4. Trianggulasi dengan teori, makna lainnya adalah dengan penjelasan banding (*rival explanation*)

### 3.5 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (2015: 337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti. Untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

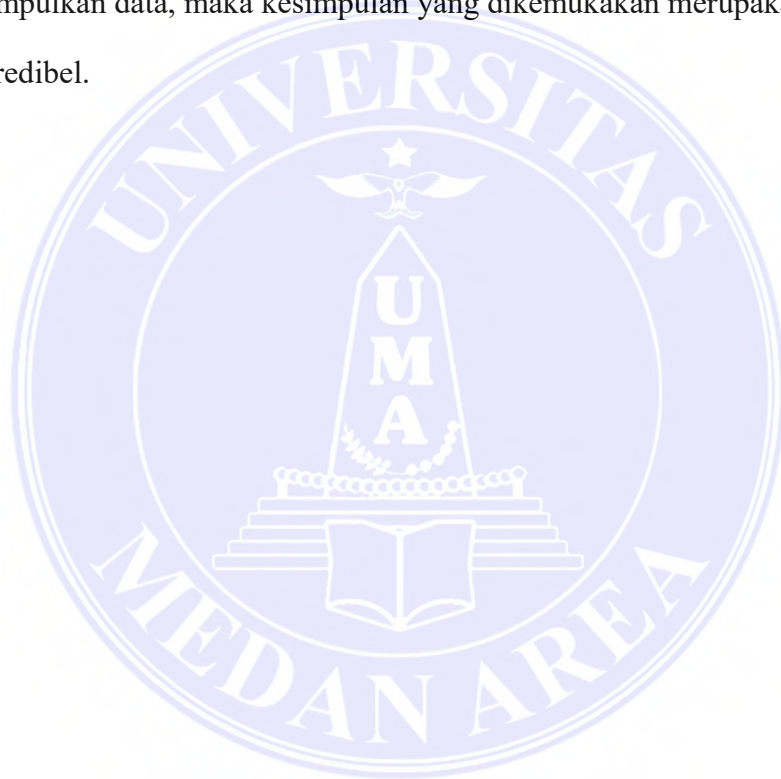
#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan *text* yang bersifat naratif. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.



### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Simpang Empat perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya harus diatur dengan baik. angan atau disebut E-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur
2. Kendala Pemerintah Desa Simpang Empat dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain : system data/tidak ditemukanya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM),tidak tepat sasaran,tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan,dan kurang lengkapnya administrasi penduduk.

## 5.2 Saran

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran yang di beri sebagai berikut :

1. Alangkah baiknya petugas maupun pegawai dalam menyalurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih pro-aktif dan kerjasama (team work) yang bagus dalam menjalankan peninjauan kembali untuk mengetahui kelancaran maupun kendala dari program tersebut dan dalam sistem pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Sosial dan Aparatur Desa terhadap Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) agar tepat sasaran dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Petugas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harusnya lebih ketat lagi dalam penyeleksian masyarakat yang dapat menerima bantuan tersebut. Dalam hal pemberian sosialisasi alangkah baiknya pihak yang berwenang lebih memaksimalkan lagi pelaksanaannya supaya merata dengan mengikutsertakan seluruh unsur elemen yang turut serta dalam mensuksuskan kegiatan tersebut terkhususnya bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu atau dibawah garis kemiskinan wajib menghadiri sosialisasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*. Jakarta: Aksara Bumi.
- Kementerian Sosial, (2018). *Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai*.
- R. Sutyo Bakir, (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Raho, Bernand. (2007). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial: berbagai alternative pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarwono. (2004). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Toeri Sosial*, Balai Pustaka
- Thoha, Miftah. (2012). *Pengantar Manajemen dan Buku Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2017 Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta Pusat: Undang-Undang,
- Tohirin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam bimbingan dan konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tuti A. Verawati, (2003). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, Makassar: Universitas 45 Makassar.
- Lapananda, Y, (2013). *Hibah dan Bantuan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Skripsi/Jurnal**

Hikmah, Hayati. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung.8(2),1-15.

Mustafida & Nunung Ifanatul. (2019).Implementasi program BPNT di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalibura Kabupaten Banyuwangi

Rohana Tiara & Maryanto. (2019). Efektivitas Progran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang.*Demography Journalof Sriwijaya*.3(1), 37-46.

### **Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017

### **Internet**

<http://repository.radenintan.ac.id/7149/1/SKRIPSI%20AHDA>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-khusus-perangkat-des-untuk-tanggulangi-covid-19>

<https://www.quireta.com/post/mengatasi-kemiskinan-di-indonesia>

<https://www.inews.id/finance/makro/ini-kelebihan-program-bpnt-dibandingkan-rastra>



## LAMPIRAN GAMBAR

**Gambar 1**

### **Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**



**Gambar II**

### **Bentuk Realisasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**



## DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN



**Gambar 3**  
**Kantor Kepala Desa Simping Empat**  
(Dokumentasi Prbadi,2021)



**Gambar 4**  
**Tampak Dari Dalam Kantor Kepala Desa Simping Empat**(Dokumentasi  
Pribadi,2021)





**Gambar 5**  
Foto Bersama Informan Kunci yaitu Ibu Jamilah selaku Sekretaris  
Desa(Dokumentasi Pribadi, 2021)



**Gambar 6**  
Foto Bersama Infroman Utama yaitu Bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa  
Simpang Empat  
(Dokumentasi Pribadi, 2021)



**Gambar 7**  
Foto bersama informan tambahan Ibu Ichfa selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  
(Dokumentasi Pribadi, 2021)

### 1. Informan Kunci

Nama : Jamilah  
Alamat : Simpang Empat  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 45 Tahun  
Jabatan : Sekretaris Desa

## 2. Informan Utama

Nama : Hasanuddin  
Alamat : Simpang Empat  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Usia : 64 Tahun  
Jabatan : Kepala Desa Kampung Simpang Empat

## 3. Informan Tambahan (Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT))

Nama : Ichfa  
Suami : Sudah Meninggal Dunia  
Anak : Ibu Yuniar  
Alamat : Desa Simpang Empat Dusun Mude Gelime  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 49 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

## 4. Informan Tambahan (Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT))

Nama : Rika Eliza  
Suami : Sudah Cerai  
Anak : Ibu Kamari  
Alamat : Desa Simpang Empat Dusun Mude Gelime  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 45 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga





**PEMERITAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
KECAMATAN BEBESEN  
**KAMPUNG SIMPANG EMPAT**  
*Alamat Jalan Lebe Kader*

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 219/SP IV/SK/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASANUDDIN  
Jabatan : Reje Kampung/Kepala Desa  
Alamat : Kampung Simpang Empat Dusun Reje Bukit Kec. Bebesen Kabupaten  
Aceh Tengah

Dengan ini menerangkan :

Nama : REZA EKA SAPUTRA  
NPM : 178520015  
Prodi Studi : Adminitrasi Publik

Telah melaksanakan pengambilan data/riset di kantor desa Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Dengan judul skripsi : ( **Peranan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah** )

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Tanggal : 26 Maret 2021

